

ABSTRAK

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi dengan melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan perempuan dari kemiskinan dan pengangguran. Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai Kajian Terhadap Peran dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Peningkatan Pemberdayaan Perempuan sebagai perwujudan Otonomi Daerah di Kota Semarang. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Apakah peningkatan pemberdayaan perempuan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan otonomi daerah (2) Bagaimana pelaksanaan urusan pemerintah dibidang dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan sebagai perwujudan otonomi daerah di kota semarang (3) Permasalahan apa yang muncul dalam pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Meningkatkan pemberdayaan Perempuan Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah di Kota Semarang.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Metode yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memaparkan suatu kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum dan peraturan-undangan yang berlaku. Pendekatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi peran dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Peningkatan Pemberdayaan Perempuan sebagai perwujudan Otonomi Daerah di Kota Semarang.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan otonomi daerah melalui peningkatan perempuan dibidang politik dan jabatan publik sehingga keterlibatan perempuan memberikan peningkatan pembangunan perempuan melalui pemberdayaan (2) Pelaksanaan urusan pemerintah dibidang dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan sebagai perwujudan otonomi daerah di Kota Semarang secara umum yang tertuang dalam Rencana Strategis 2016-2021 ialah, Keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak, Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender. Kemudian program kerja pemberdayaan perempuan yang sudah terealisasi diantaranya : Pelatihan kewirausahaan menjahit, Kepemimpinan, olah sampah, membuat, memasak, sulam pita, hantaran pengantin (3) Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Meningkatkan pemberdayaan Perempuan Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah di Kota Semarang yakni *Faktor penghambat*: Pendidikan yang rendah, Adat dan Kebudayaan di daerah, Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih sedikit. *Faktor pendukung*: Kebijakan, sarana dan prasarana, *Solusi* : Mengadakan pelatihan menunjang keahlian, mengadakan penyuluhan, menambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kata Kunci : Pemberdayaan Perempuan, DP3A Kota Semarang

ABSTRAK

The role of local governments in improving women's empowerment in the economic field by making concerted efforts to accelerate the process of eradicating women from poverty and unemployment. In this study will examine the Study on the Role and Function of the Department of Women Empowerment and Child Protection (DP3A) in Increasing Women Empowerment as the realization of Regional Autonomy in Semarang City. The main questions to be answered through this research are (1) Whether improving women's empowerment can be a means of realizing regional autonomy (2) how the implementation of government affairs in the field of women's empowerment and child protection in improving the empowerment of women as the realization of regional autonomy in the city of Semarang (3) What problems arise in the implementation of the Department of Women Empowerment and Child Protection in Increasing the Empowerment of Women as the Realization of Regional Autonomy in Semarang City.

To answer the question, qualitative research is conducted by approach of Sociological Juridical which is analytical descriptive. The sociological juridical method is an approach that aims to describe a fact that is in the field based on applicable legal principles and regulations. This approach serves to identify the role and function of the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in Increasing Women Empowerment as the realization of Regional Autonomy in Semarang City.

The findings of this study indicate that (1) Improving women's empowerment can be a means to realize regional autonomy through increasing women in politics and public position so that the involvement of women provides enhancement of women's development through empowerment (2) The implementation of government affairs in the field of women's empowerment and child protection in increasing the empowerment of women as the realization of regional autonomy in Semarang City generally stated in the Strategic Plan 2016-2021 is, The harmony of policy of improving the quality of women and children, Institutional strengthening of gender and child mainstreaming, Improving the quality of life and protection of women, Increasing participation and gender equality. Then the work program of women empowerment that has been realized include: Training of sewing entrepreneurship, Leadership, trash, batik, cooking, ribbon embroidery, bridal delivery (3) The problems that arise in the implementation of the Office of Women Empowerment and Child Protection in Enhancing Women Empowerment as the Realization of Regional Autonomy in Semarang City: Inhibiting Factors: Low Education, Adat and Culture in the area, Number of Human Resources (HR) is still small. Supporting factors: Policy, facilities and infrastructure, Solution: Conducting training to support skills, counseling, increasing the number of Human Resources (HR) Non Civil State Apparatus (ASN).

Keywords: Women Empowerment, DP3A Semarang City.